



salinan

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 95 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN  
ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);

10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 95 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEKALONGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 95), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 30 Mei 2023

BUPATI PEKALONGAN,  
TTD  
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 30 Mei 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
TTD  
M. YULIAN AKBAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 25  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,  
  
ADITOMO HERLAMBAŃ, SH  
Pembina  
Nip. 19680517 198903 1 009

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PEKALONGAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kelas 14
--

Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 14	1	1	0
Kelas 13	0	0	0
Kelas 12	1	5	-4
Kelas 11	4	11	-7
Kelas 10	3	4	-1
Kelas 9	13	20	-7
Kelas 8	15	36	-21
Kelas 7	34	46	-12
Kelas 6	27	35	-8
Kelas 5	119	339	-220
Kelas 3	4	6	-2
Kelas 1	6	14	-8
Jumlah	227	517	-290

Kelompok Jabatan Fungsional				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	0	1	-1
Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	12	0	2	-2
Perencana Ahli Madya	12	0	1	-1
Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	11	0	1	-1
Penata Ruang Ahli Madya	11	0	1	-1
Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Madya	11	0	2	-2
Pengelola Sumber Daya Air Ahli Madya	11	0	1	-1
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya	11	0	2	-2

Sekretaris Dinas Kelas 12
------------------------------

Kepala Subbagian Perencanaan Kelas 9				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Perencana Ahli Pertama	8	0	1	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	2	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0

Kepala Subbagian Keuangan Kelas 9				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penelaah Teknis Kebijakan	7	6	7	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	2	2	0

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kelas 9				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Arsiparis Penyelia	8	0	2	-2
Arsiparis Mahir	7	0	2	-2
Arsiparis Terampil	6	1	2	-1
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir	7	0	1	-1
Pranata Komputer Terampil	6	0	2	-2
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	6	3	3	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0
Penata Layanan Operasional	3	1	2	-1
Penata Layanan Operasional	1	1	1	0

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Perencana Ahli Muda	10	0	1	-1

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Kelas 11				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda	9	2	3	-1
Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama	8	0	8	-8
Pengelola Sumber Daya Air	7	6	6	0
Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	7	2	2	0
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0
Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	1	2	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	2	-2
Petugas Operasi dan Pemeliharaan	5	0	1	-1
Teknisi Sarana dan Prasarana	5	2	2	0

Kepala Bidang Cipta Karya Kelas 11				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	10	2	2	0
Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	8	2	2	0
Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	1	2	-1
Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	1	4	-3
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	9	1	3	-2
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	8	1	4	-3
Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	7	0	2	-2
Penelaah Teknis Infrastruktur	7	3	3	0
Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik	7	0	2	-2
Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	7	0	2	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	1	2	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0
Teknisi Sarana dan Prasarana	5	1	1	0
Penata Layanan Operasional	3	3	4	-1
Penata Layanan Operasional	1	2	3	-1

Kepala Bidang Bina Marga Kelas 11				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	1	2	-1
Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8	1	1	0
Penata Kelola Leger Jalan	7	1	2	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik	7	3	4	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0
Penilik Jalan	5	2	3	-1
Teknisi Sarana dan Prasarana	5	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0
Operator Alat Berat	5	13	15	-2

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Kelas 11				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	1	0
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	1	-1
Penata Ruang Ahli Muda	9	1	3	-2
Penata Ruang Ahli Pertama	8	3	5	-2
Penelaah Teknis Infrastruktur	7	2	2	0
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	2	0
Pranata Kewilayahan	7	1	1	0
Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0

UPTD
------

Keterangan :  
 KL : Kelas Jabatan  
 B : Jumlah Pegawai yang tersedia  
 K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja  
 S : Selisih

1. UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN  
WILAYAH I DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG

Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I
Kelas 9

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD				
Kelas 8				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penilik Jalan	5	22	55	-33
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0
Penata Layanan Operasional	1	1	2	-1

Keterangan :

KL : Kelas Jabatan

B : Jumlah Pegawai yang tersedia

K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja

S : Selisih

2. UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN  
WILAYAH II DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG

Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II
Kelas 9

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD				
Kelas 8				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penilik Jalan	5	19	75	-56
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	3	-1
Penata Layanan Operasional	1	0	2	-2

Keterangan :

KL : Kelas Jabatan

B : Jumlah Pegawai yang tersedia

K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja

S : Selisih

3. UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN  
WILAYAH III DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG

Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III
Kelas 9

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD				
Kelas 8				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penilik Jalan	5	12	73	-61
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0
Penata Layanan Operasional	1	1	2	-1

Keterangan :

KL : Kelas Jabatan

B : Jumlah Pegawai yang tersedia

K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja

S : Selisih

4. UPTD PEMELIHARAAN IRIGASI PADUREKSO DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kepala UPTD Pemeliharaan Irigasi Padurekso				
Kelas 8				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	5	5	0
Petugas Operasi dan Pemeliharaan	5	10	23	-13
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0
Penata Layanan Operasional	1	0	1	-1

Keterangan :

KL : Kelas Jabatan

B : Jumlah Pegawai yang tersedia

K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja

S : Selisih

5. UPTD PEMELIHARAAN IRIGASI BRONDONG DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kepala UPTD Pemeliharaan Irigasi Brondong				
Kelas 8				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0
Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	5	5	0
Petugas Operasi dan Pemeliharaan	5	12	43	-31
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0
Penata Layanan Operasional	1	1	1	0

Keterangan :

KL : Kelas Jabatan

B : Jumlah Pegawai yang tersedia

K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja

S : Selisih

6. UPTD PEMELIHARAAN IRIGASI PESANTREN KLETAK  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kepala UPTD Pemeliharaan Irigasi Pesantren Kletak				
Kelas 8				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0
Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	5	5	0
Petugas Operasi dan Pemeliharaan	5	9	24	-15
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0
Penata Layanan Operasional	1	0	1	-1

Keterangan :

KL : Kelas Jabatan

B : Jumlah Pegawai yang tersedia

K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja

S : Selisih

7. UPTD LABORATORIUM DAN BENGKEL DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kepala UPTD Laboratorium dan Bengkel				
Kelas 9				
Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD				
Kelas 8				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penelaah Teknis Infrastruktur	7	3	3	0
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
Teknisi Sarana dan Prasarana	5	0	3	-3
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0
Penata Layanan Operasional	1	0	1	-1

Keterangan :

KL : Kelas Jabatan

B : Jumlah Pegawai yang tersedia

K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja

S : Selisih

BUPATI PEKALONGAN,  
TTD  
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBAANG, SH

Pembina

Nip. 19680517 198903 1 009